RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KABUDAYAAN, DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS 2024

Telp : (0281) 637629
www.dinporabudpar.banyumaskab.go.id
Jl. Prof. dr. Soeharso No.45
Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur
Banyumas, 53114

BAB I
GAMBARAN UMUM

1.1 PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian Operasional yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan

dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Tindak Pengendalian Operasional ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Operasional pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas adalah:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.4 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Operasional untuk memberikan acuan Dinporabudpar dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.5 MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian Operasional di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas;
2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

1.6 RUANG LINGKUP

Evaluasi RTP Operasional ini fokus kepada pengendalian atas kegiaran- kegiatab pokok dalam rangka pencapauan tujuan yang telah ditetapkan di Dinporabudpar kabupaten banyumas. Pelaksanaan RTP Operasional melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkat manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

Penyusunan RTP Operasional strategis untuk tahun 2024 berdasarkan pada Sasaran Operasional Dinporabudpar Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya pertumbuhan desa, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatnya kelestarian budaya daerah.

Penyusunan RTP Operasional Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus olehpimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas

pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1) Penegakan integritas dan nilai etika;
2) Komitmen terhadap kompetensi;
3) Kepemimpinan yang kondusif;
4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risikoorganisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing.*

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation.* Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang berifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan

pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

2.1 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan saran untuk mendukung SPIP dan tertuang dalam dokumen RTP.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur- unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian DinporabudparKabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Survei persepsi yang telah dilaksanakan pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Dinporabudpar Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 50 (lima puluh) dari total pegawai 93 (sembilan puluh tiga) terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden yaitu 30% dari total pegawai. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Sedangkan berdasarkan reviu dokumen menunjukkan hasil bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut :

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Kelemahan : Kurangnya disiplin dan motivasi kerja PNS.

3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	**Penegakan Integritas dan Nilai Etika**		
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap jam kerja, disiplin, serta motivasi kerja kepada seluruh PNS	Dinporabudpar Kabupaten Banyumas	Tahun 2023 - 2024

	di lingkungan Dinporabudpar kabupaten Banyumas		

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran:

Form 1.a : *Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

Form 1.b : *CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinporabudpar Kabupaten Banyumas*

Form 1.c : *Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinporabudpar Kabupaten Banyumas*

BAB IV
PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pengelolaan risiko strategis OPD
b. Pengelolaan risiko operasional OPD

Kedua klasifikasi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dab ibdikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

No	Konteks	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator
1.	Risiko strategis	Meningkatnya kemandirian pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
		Meningkatkan prestasi dan peran aktif pemuda	Persentase peningkatan Prestasi dan Peran aktif Pemuda yang di fasilitasi Dinporabudpar
		Meningkatnya Pengembangan Potensi dan peran aktif pemuda	Presentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif
		Optimalnya potensi kebudayaan dan pariwisata	Persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata
2.	Risiko Operasional	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan dan Pengembangan wirausaha muda Jumlah pelatihan peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan SDM Keolahragaan yang dilaksanakan
		Penyelenggaraan	

		Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten Kota
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Terbina
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Organisasi Olahraga yang Terbina
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kegiatan kepramukaan
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan lembaga adat
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan kesenian lingkup Bidang Kebudayaan nilai budaya kesejarahan kesenian permuseuman cagar budaya perfilman
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola Pemda
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

			Jumlah Desa Wisata yang memiliki SK
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan pemasaran wisata yang dilaksanakan
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah laporan pelaksanaan Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas ekonomi kreatif yang dilaksanakan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis Dinporabudpar

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinporabudpar

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukan pada lampiran:

Form 3.c : Identifikasi risiko operasional Dinporabudpar

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Dinporabudpar :

No	Risiko Prioritas
	Risiko Operasional OPD
1	minimnya kelompok kesenian atau sanggar yang aktif di Kabupaten Banyumas
2	tingkat kebugaran masyarakat menurun
3	kurang optimalnya pengelolaan organisasi kepemudaan
4	menurunya kualitas pramuka Kabupaten Banyumas
5	minimnya jumlah rintisan wirausaha muda pemula
6	minimnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan
7	minimnya pelatihan bagi atlet ditingkat pelajar
8	kurangnya kesempatan kerja pada pelaku wisata yang tidak bersertifikasi
9	Media promosi dan pemasaran yang dimiliki kurang populer
10	banyaknya organisasi olahraga yang kurang berkembang
11	Banyaknya cagar budaya yang rusak atau hilang
12	kualitas daya tarik wisata kurang menarik minat pengunjung
13	kurang berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Banyumas
14	minimnya lembaga adat yang terinventarisasi dan terfasilitasi
15	punahnya kebudayaan Banyumas
16	koleksi museum yang stagnan
17	pengembangan desa wisata yang kurang optimal

18	kurang terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata
19	Tidak semua pelaku ekonomi kreatif bergabung dalam ekosistem ekonomi kreatif
20	kurang berkembangnya kapasitas ekonomi kreatif
21	menurunnya minat atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga
	Kurangnya sinkronisasi BKU dengan laporan penutupan kas.
22	Kurangnya sinkronisasi BKU dengan laporan penutupan kas.
23	
24	keterlambatan dalam memenuhi permintaan data dari pihak terkait

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran form 5.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V
KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yangada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

   Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

   a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
   b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
   c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
   d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
   e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
   f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

BAB VI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinporabudpar perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi rapat, koordinasi, konsultasi, FGD dan desk.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

BAB VII
PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

BAB VIII
PENUTUP

Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis SPIP Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk evaluasi dan monitoring capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/ sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan sesuai RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Maret 2024

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP.
19660127 198607 1 001

LAMPIRAN

Lampiran II : Form 1.b

CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHP Inspektorat Tahun 2017 No. 700/086.08/034/IRB.I/2017	Kurangnya disiplin dan motivasi kerja PNS	telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan jam kerja, disiplin, serta motivasi kerja kepada seluruh PNS dilingkungan Dinporabdpar Kab. Banyumas	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA

Lampiran III : Form 1.c.

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Memadai		-	
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	

FORM 2C

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	: URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	: NON URUSAN
OPD yang Dinilai	: DINPORABUDPAR
Sumber Data	: Renja Perubahan 2022
Tujuan Strategis	Meningkatnya daya tarik wisata
	Meningkatnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan
	Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif sub sektor pariwisata
	Meningkatnya daya saing pelajar dan pemuda
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
	b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
	d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	5 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	6 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	7 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	8 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
	a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
	9 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

	10 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	11 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
	12 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	jumlah kesenian tradisional yang aktif | Target: 24 kesenian
	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Target: 3 event
	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas | Target: 1034 koleksi museum
	Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina | Target: 1 organisasi
	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Target: 5 Keg
	Jumlah Kebudayaan daerah yang diselenggarakan | Target: 17 Keg
	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola | Target: 9 destinasi
	Jumlah pembinaan sejarah lokal | Target: 1 pembinaan
	Kwartir cabang tergiat tingkat propinsi | Target: 1 kwartir
	Jumlah rintisan wirausaha muda pemula yang difasilitasi | Target: 100 Orang
	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah | Target: 59 cagar budaya
	Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan | Target: 2 Orang
	Jumlah lembaga adat yang aktif | Target: 8 lembaga
	Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan | Target: 6 event
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun | Target: 3 Dokumen
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan | Target: 5 Jenis
	Jumlah administrasi umum yang dikelola | Target: 6 Jenis
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Target: 3 Jenis
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | Target: 2 Jenis
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Target: 3 Jenis
	Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan | Target: 53 Jenis
	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola pemda | Target: 50 daya tarik
	Jumlah SDM kepariwisataan yang bersertifikasi | Target: 80 Orang
	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati | Target: 0 cagar budaya
	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang | Target: 5 Orang
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif | Target: 100 organisasi

Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah rintisan wirausaha muda pemula yang difasilitasi | Target: 100 Orang
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif | Target: 100 organisasi
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang bersertifikasi di satuan pendidikan | Target: 2 Orang
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Target: 3 event
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang terbina | Target: 1 organisasi
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan | Target: 6 event
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kwartir cabang tergiat tingkat propinsi | Target: 1 kwartir
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan daerah yang diselenggarakan | Target: 17 Keg
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan | Target: 53 Jenis
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang aktif | Target: 8 lembaga
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kesenian tradisional yang aktif | Target: 24 kesenian
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sejarah lokal | Target: 1 pembinaan
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati | Target: 0 cagar budaya
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah | Target: 59 cagar budaya
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas | Target: 1034 koleksi museum
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola pemda | Target: 50 daya tarik

	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola | Target: 9 destinasi
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Target: 5 Keg
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM kepariwisataan yang bersertifikasi | Target: 80 Orang
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang | Target: 5 Orang
	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun | Target: 3 Dokumen
	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola | Target: 2 Jenis
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola | Target: 6 Jenis
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Target: 3 Jenis
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia | Target: 3 Jenis
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan | Target: 5 Jenis

Purwokerto, Juli 2023

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP.
19660127 198607 1 001

Lampiran Form 3C

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN dan PARIWISATA KAB. BANYUMAS

Jenis	NO	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Optimalnya pengembangan pariwisata berbasis potensi kebudayaan dan ekonomi kreatif											
Ind Tujuan				Persentase peningkatan kunjungan daya tarik wisata dan event									
Sasaran		Optimalnya pengembangan pariwisata berbasis potensi kebudayaan dan ekonomi kreatif											
Ind Sasaran				Persentase Peningkatan PAD pada daya tarik wisata yang dikelola pemda									
Ind Sasaran				Persentase peningkatan kebudayaan yang menjadi daya tarik wisata									
Program		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK											

		DESTINASI PARIWISATA											
Ind Program				Persentase peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata yang dikelola Pemda									
Kegiatan		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah daya tarik wisata yang dikelola Pemda	kualitas daya tarik wisata kurang menarik minat pengunjung	326	21303001	kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam pengelolaan daya tarik wisata	Internal	C	menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah	pemerintah daerah	DINPORABUDPAR
Ind Kegiatan				Jumlah Festival Event Pariwisata yang dilaksanakan	kurang optimalnya penyelenggaraan event pariwisata	326	21303001	event pariwisata kurang diminati	Internal	C	kunjungan wisatawan menurun	pemerintah daerah, penyelenggara event pariwisata	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	kurang terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata	326	21303001	banyaknya sarana dan prasarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeliharaan	Internal	C	semakin banyaknya sarana dan prasarana yang kurang terpelihara dan rusak	opd, pengelola objek	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota											

Ind Kegiatan				Jumlah Desa Wisata yang memiliki SK	pengembangan desa wisata yang kurang optimal	326	21303001	pengelola desa wisata tidak bisa menjalankan aktivitas wisatanya	Internal	C	terjadi penurunan aktivitas desa wisata	opd, pemerintah desa, pengelola desa wisata, pokdarwis	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
Ind Program				Persentase peningkatan budaya yang menjadi daya tarik wisata									
Kegiatan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Persentase Kebudayaan yang terlestarikan	punahnya kebudayaan Banyumas	222	21303001	kurangnya kegiatan pelestarian kebudayaan	Eksternal	UC	kebudayaan Banyumas semakin langka di temukan di masyarakat	pemerintah daerah, masyarakat	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan pembinaan kesenian lingkup Bidang Kebudayaan nilai budaya kesejarahan kesenian permuseuman cagar budaya perfilman	kurang berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Banyumas	222	21303001	kurangnya fasilitasi SDM dan kelembagaan kebudayaan di Kabupaten Banyumas	Internal	C	semakin langka pelaku budaya dan lembaga kebudayaan yang melestarikan kebudayaan Banyumas	pelaku budaya, lembaga kebudayaan, pemerintah daerah	DINPORABUDPAR

Kegiatan		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah jenis kesenian yang dilestarikan	minimnya kelompok kesenian atau sanggar yang aktif di Kabupaten Banyumas	222	21303001	kurangnya fasilitasi pelestarian kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas	Internal	C	kesenian tradisional tidak mempunyai regenerasi dan dapat punah	kelompok kesenian, sanggar seni tradisional	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan Pembinaan lembaga adat	minimnya lembaga adat yang terinventarisasi dan terfasilitasi	222	21303001	kurangnya fasilitasi kegiatan lembaga adat di masyarakat	Internal	C	hilangnya upacara adat atau Ritus tradisional di Kabupaten Banyumas	masyarakat	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
Ind Program				Persentase Peningkatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata									
Kegiatan		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											

Ind Kegiatan				Jumlah promosi dan pemasaran wisata yang dilaksanakan	Media promosi dan pemasaran yang dimiliki kurang populer	326	21303001	media promosi dan pemasaran belum bisa diakses di luar negeri	Eksternal	UC	kurang optimalnya kunjungan wisatawan	pemerintah kabupaten dan masyarakat	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH											
Ind Program				Persentase pembinaan sejarah lokal									
Kegiatan		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah pembinaan sejarah lokal	minimnya pengetahuan sejarah lokal di masyarakat	222	21303001	kurangnya fasilitasi pembinaan sejarah loka	Internal	C	pelestarian sejarah lokal kurang maksimal	Sejarahwan, pemerintah daerah, masyarakat	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA											
Ind Program				Persentase cagar budaya yang dilestarikan oleh Pemerintah Daerah									
Kegiatan		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah cagar budaya yang dikelola Pemerintah Daerah	Banyaknya cagar budaya yang rusak atau hilang	222	21303001	kurang terpeliharanya cagar budaya	Internal	C	Banyak cagar budaya yang punah atau hilang	masyarakat, pemerintah daerah	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN											

Ind Program				Persentase koleksi museum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas									
Kegiatan		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah koleksi museum dikelola oleh Pemkab Banyumas	koleksi museum yang stagnan	222	21303001	kurang adanya inovasi dalam pengelolaan koleksi museum	Internal	C	kurang berkembangnya museum	pengelola museum, pemerintah daerah	DINPORABUDPAR
Sasaran		Optimalnya pengembangan pariwisata berbasis potensi kebudayaan dan ekonomi kreatif											
Ind Sasaran				persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif									
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
Ind Program				Persentase Peningkatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif									
Ind Program				Persentase SDM Kepariwisataan yang bersertifikat									

Kegiatan		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar											
Ind Kegiatan				Jumlah Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kurangnya kesempatan kerja pada pelaku wisata yang tidak bersertifikasi	326	21303001	kurangnya fasilitasi sertifikasi SDM pariwisata	Internal	C	banyaknya SDM pariwisata yang kurang kompeten	SDM Pariwisata	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif											
Ind Kegiatan				Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas ekonomi kreatif yang dilaksanakan	kurang berkembangnya kapasitas ekonomi kreatif	326	21303001	kurang adanya fasilitasi pengembangan kapasitas ekonomi kreatif	Internal	C	kapasitas ekonomi kreatif rendah	pelaku ekonomi kreatif	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
Ind Program				Persentase Peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar di HKI									
Kegiatan		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											

Ind Kegiatan				Jumlah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang dilaksanakan	Tidak semua pelaku ekonomi kreatif bergabung dalam ekosistem ekonomi kreatif	326	21303001	belum dilakukan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Internal	C	lemahnya ekosistem ekonomi kreatif	pelaku ekonomi kreatif	DINPORABUDPAR
Tujuan		meningkatnya kapabilitas dan daya saing pemuda											
Ind Tujuan				Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan									
Sasaran		meningkatnya kapabilitas dan daya saing pemuda											
Ind Sasaran				Persentase Peningkatan Prestasi dan peran aktif Pemuda yang di fasilitasi Dinporabudpar									
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
Ind Program				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan									

Kegiatan		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	kurang optimalnya pengelolaan organisasi kepemudaan	219	21303001	kurangnya fasilitasi manajemen organisasi terhadap anggota organisasi kepemudaan	Internal	C	minimnya perkembangan organisasi kepemudaan	pemerintah daerah, organisasi kepemudaan	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											
Ind Program				Persentase peningkatan kegiatan kepramukaan di Kabupaten									
Kegiatan		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan kepramukaan	menurunya kualitas pramuka Kabupaten Banyumas	219	21303001	belum semua kegiatan kwarcab terfasilitasi	Internal	C	prestasi kwarcab Kabupaten Banyumas menurun	kwarcab	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											
Ind Program				Presentase peningkatan prestasi									

				olahraga pemuda									
Kegiatan		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah pembinaan SDM Keolahragaan yang dilaksanakan	minimnya pelatihan bagi atlet ditingkat pelajar	219	21303001	kurangnya jumlah SDM keolahragaan yang bersertifikat	Internal	C	menurunnya prestasi atlet ditingkat pelajar	atlet tingkat pelajar, pemerintah daerah	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Daerah Kabupaten Kota	menurunnya minat atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga	219	21303001	minimnya kompetisi olahraga yang terselenggara	Internal	C	menurunnya jumlah atlet yang berprestasi	atlet, pemerintah daerah, organisasi olahraga	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											
Ind Kegiatan				Jumlah Organisasi Olahraga yang Terbina	banyaknya organisasi olahraga yang kurang berkembang	219	21303001	kurangnya fasilitasi organisasi olahraga yang terbina	Internal	C	banyak organisasi olahraga tidak berjalan dengan baik	organisasi olahraga	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											

Ind Kegiatan				Jumlah olahraga rekreasi yang dilaksanakan	tingkat kebugaran masyarakat menurun	219	21303001	minimnya fasilitas olahraga rekreasi yang tersedia	Internal	C	tingkat kesehatan masyarakat rendah	masyarakat, pemerintah daerah	DINPORABUDPAR
Program		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Ind Program				Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah									
Kegiatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Ind Kegiatan				Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	keterlambatan dalam memenuhi permintaan data dari pihak terkait	XXX	21303001	Kurangnya SDM yang memadai	Internal	C	Terlambat mengirimkan laporan dokumen	OPD terkait	DINPORABUDPAR
Kegiatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Ind Kegiatan				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kurangnya sinkronisasi BKU dengan laporan penutupan kas.	XXX	21303001	kurang tepat waktu dalam menginput SPJ kegiatan pada aplikasi Satria Keuangan	Internal	C	terjadi selisih saldo pada BKU Satria Keuangan	SDM Keuangan	DINPORABUDPAR

Kegiatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Kegiatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Sasaran		meningkatnya kapabilitas dan daya saing pemuda											
Ind Sasaran				Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri									
Program		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											
Ind Program				Persentase Peningkatan Wirausaha Muda									

Kegiatan		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah Pelatihan dan Pengembangan wirausaha muda	minimnya jumlah rintisan wirausaha muda pemula	219	21303001	kurangnya pelatihan bagi rintisan wirausaha muda pemula	Internal	C	kurangnya daya saing atau kapasitas wirausaha muda pemula	wirausaha muda pemula	DINPORABUDPAR
Ind Kegiatan				Jumlah fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan	minimnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	219	21303001	kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan	Internal	C	kurangnya kapasitas dan kompetensi pemuda dalam berkegiatan	pemerintah daerah, pemuda	DINPORABUDPAR

REKAP SKALA RISIKO OPERASIONAL
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	minimnya kelompok kesenian atau sanggar yang aktif di Kabupaten Banyumas	ROO.24	222	19	19	2.6	2.7	7.02
2	tingkat kebugaran masyarakat menurun	ROO.24	219	19	19	2.6	2.6	6.76
3	kurang optimalnya pengelolaan organisasi kepemudaan	ROO.24	219	19	19	2.7	2.7	7.29
4	menurunya kualitas pramuka Kabupaten Banyumas	ROO.24	219	19	19	2.6	2.5	6.5
5	minimnya jumlah rintisan wirausaha muda pemula	ROO.24	219	19	19	2.7	2.6	7.02
6	minimnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	ROO.24	219	19	19	2.7	2.6	7.02
7	minimnya pelatihan bagi atlet ditingkat pelajar	ROO.24	219	19	19	2.7	2.7	7.29
8	kurangnya kesempatan kerja pada pelaku wisata yang tidak bersertifikasi	ROO.24	326	19	19	2.8	2.8	7.84
9	Media promosi dan pemasaran yang dimiliki kurang populer	ROO.24	326	19	19	2.9	2.8	8.12
10	banyaknya organisasi olahraga yang kurang berkembang	ROO.24	219	19	19	2.7	2.8	7.56
11	Banyaknya cagar budaya yang rusak atau hilang	ROO.24	222	19	19	2.8	2.8	7.84
12	kualitas daya tarik wisata kurang menarik minat pengunjung	ROO.24	326	19	19	2.7	2.8	7.56
13	kurang berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Banyumas	ROO.24	222	19	19	2.7	2.7	7.29
14	minimnya lembaga adat yang terinventarisasi dan terfasilitasi	ROO.24	222	19	19	2.8	2.9	8.12
15	punahnya kebudayaan Banyumas	ROO.24	222	19	19	2.8	2.6	7.28
16	koleksi museum yang stagnan	ROO.24	222	19	19	2.8	2.7	7.56
17	pengembangan desa wisata yang kurang optimal	ROO.24	326	19	19	2.7	2.6	7.02
18	kurang terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata	ROO.24	326	19	19	2.8	2.8	7.84
19	Tidak semua pelaku ekonomi kreatif bergabung dalam ekosistem ekonomi kreatif	ROO.24	326	19	19	2.7	2.7	7.29
20	kurang berkembangnya kapasitas ekonomi kreatif	ROO.24	326	19	19	2.6	2.7	7.02
21	menurunnya minat atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga	ROO.24	219	19	19	2.7	2.6	7.02
22	Kurangnya sinkronisasi BKU dengan laporan penutupan kas.	ROO.24	XXX	19	19			0
23		ROO.24	XXX	19	19			0
24	keterlambatan dalam memenuhi permintaan data dari pihak terkait	ROO.24	XXX	19	19			0

LAMPIRAN FORM 5C

REKAP SKALA RISIKO PRIORITAS OPERASIONAL
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	minimnya kelompok kesenian atau sanggar yang aktif di Kabupaten Banyumas	ROO.24	222	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi pelestarian kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas	kesenian tradisional tidak mempunyai regenerasi dan dapat punah
2	tingkat kebugaran masyarakat menurun	ROO.24	219	19	19	6.76	DINPORABUDPAR	minimnya fasilitas olahraga rekreasi yang tersedia	tingkat kesehatan masyarakat rendah
3	kurang optimalnya pengelolaan organisasi kepemudaan	ROO.24	219	19	19	7.29	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi manajemen organisasi terhadap anggota organisasi kepemudaan	minimnya perkembangan organisasi kepemudaan
4	menurunya kualitas pramuka Kabupaten Banyumas	ROO.24	219	19	19	6.5	DINPORABUDPAR	belum semua kegiatan kwarcab terfasilitasi	prestasi kwarcab Kabupaten Banyumas menurun
5	minimnya jumlah rintisan wirausaha muda pemula	ROO.24	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurangnya pelatihan bagi rintisan wirausaha muda pemula	kurangnya daya saing atau kapasitas wirausaha muda pemula
6	minimnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	ROO.24	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi kegiatan kepemudaan	kurangnya kapasitas dan kompetensi pemuda dalam berkegiatan
7	minimnya pelatihan bagi atlet ditingkat pelajar	ROO.24	219	19	19	7.29	DINPORABUDPAR	kurangnya jumlah SDM keolahragaan yang bersertifikat	menurunnya prestasi atlet ditingkat pelajar
8	kurangnya kesempatan kerja pada pelaku wisata yang tidak bersertifikasi	ROO.24	326	19	19	7.84	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi sertifikasi SDM pariwisata	banyaknya SDM pariwisata yang kurang kompeten
9	Media promosi dan pemasaran yang dimiliki kurang populer	ROO.24	326	19	19	8.12	DINPORABUDPAR	media promosi dan pemasaran belum bisa diakses di luar negeri	kurang optimalnya kunjungan wisatawan
10	banyaknya organisasi olahraga yang kurang berkembang	ROO.24	219	19	19	7.56	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi organisasi olahraga yang terbina	banyak organisasi olahraga tidak berjalan dengan baik
11	Banyaknya cagar budaya yang rusak atau hilang	ROO.24	222	19	19	7.84	DINPORABUDPAR	kurang terpeliharanya cagar budaya	Banyak cagar budaya yang punah atau hilang
12	kualitas daya tarik wisata kurang menarik minat pengunjung	ROO.24	326	19	19	7.56	DINPORABUDPAR	kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam pengelolaan daya tarik wisata	menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah
13	kurang berkembangnya kebudayaan di Kabupaten Banyumas	ROO.24	222	19	19	7.29	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi SDM dan kelembagaan kebudayaan di Kabupaten Banyumas	semakin langka pelaku budaya dan lembaga kebudayaan yang melestarikan kebudayaan Banyumas

14	minimnya lembaga adat yang terinventarisasi dan terfasilitasi	ROO.24	222	19	19	8.12	DINPORABUDPAR	kurangnya fasilitasi kegiatan lembaga adat di masyarakat	hilangnya upacara adat atau Ritus tradisional di Kabupaten Banyumas
15	punahnya kebudayaan Banyumas	ROO.24	222	19	19	7.28	DINPORABUDPAR	kurangnya kegiatan pelestarian kebudayaan	kebudayaan Banyumas semakin langka di temukan di masyarakat
16	koleksi museum yang stagnan	ROO.24	222	19	19	7.56	DINPORABUDPAR	kurang adanya inovasi dalam pengelolaan koleksi museum	kurang berkembangnya museum
17	pengembangan desa wisata yang kurang optimal	ROO.24	326	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	pengelola desa wisata tidak bisa menjalankan aktivitas wisatanya	terjadi penurunan aktivitas desa wisata
18	kurang terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata	ROO.24	326	19	19	7.84	DINPORABUDPAR	banyaknya sarana dan prasarana yang sudah lama tidak dilakukan pemeliharaan	semakin banyaknya sarana dan prasarana yang kurang terpelihara dan rusak
19	Tidak semua pelaku ekonomi kreatif bergabung dalam ekosistem ekonomi kreatif	ROO.24	326	19	19	7.29	DINPORABUDPAR	belum dilakukan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	lemahnya ekosistem ekonomi kreatif
20	kurang berkembangnya kapasitas ekonomi kreatif	ROO.24	326	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	kurang adanya fasilitasi pengembangan kapasitas ekonomi kreatif	kapasitas ekonomi kreatif rendah
21	menurunnya minat atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga	ROO.24	219	19	19	7.02	DINPORABUDPAR	minimnya kompetisi olahraga yang terselenggara	menurunnya jumlah atlet yang berprestasi
22	Kurangnya sinkronisasi BKU dengan laporan penutupan kas.	ROO.24	XXX	19	19	0	DINPORABUDPAR	kurang tepat waktu dalam menginput SPJ kegiatan pada aplikasi Satria Keuangan	terjadi selisih saldo pada BKU Satria Keuangan
23		ROO.24	XXX	19	19	0	DINPORABUDPAR		
24	keterlambatan dalam memenuhi permintaan data dari pihak terkait	ROO.24	XXX	19	19	0	DINPORABUDPAR	Kurangnya SDM yang memadai	Terlambat mengirimkan laporan dokumen

LAMPIRAN FORM 6

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK LINGKUNGAN PENGENDALIAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT						
	LHP Inspektorat Tahun 2017 No. 700/080.0P/114/IRB.2/2017	LHP Inspektorat Tahun 2017 No. 700/080.0P/114/IRB.2/2017	E	1	mengadakan rapat intern dengan mengundang narasumber pihak Balapan serta melakukan survey pasar setempat	Dinporabudpar Kab. Banyumas	Tahun 2024 - 2025

LAMPIRAN FORM 7C

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN UNTUK MENGATASI RISIKO OPERASIONAL OPD DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	minimnya kelompok kesenian atau sanggar yang aktif di Kabupaten Banyumas		Meningkatkan akses bantuan kelompok kesenian untuk kegiatan pementasan dan pagelaran kesenian	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan pelibatan kelompok kesenian pada kegiatan workshop dan pementasan kesenian untuk pelestarian kebudayaan	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2024
2	minimnya jumlah rintisan wirausaha muda pemula		Melakukan pelatihan wirausaha yang produktif dan diminati usia muda	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengoptimalkan kegiatan pelatihan wirausaha yang produktif dan diminati usia muda	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2024
3	minimnya pelatihan bagi atlet ditingkat pelajar		Melakukan pembinaan olahraga melalui POPDA Kabupaten Banyumas jenjang SD, SMP, dan SMA	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengevaluasi jalannya pembinaan pada pengurus cabang olahraga di tingkat Kabupaten Banyumas	Kepala Dinporabudpar	Tahun 2024
4	Media promosi dan pemasaran yang dimiliki kurang populer		Melakukan promosi melalui media sosial	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan promosi dengan melibatkan influercer atau key opinion leader (KOL)	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024
5	kualitas daya tarik wisata kurang menarik minat pengunjung		Menambah atraksi wisata yang ada di destinasi wisata	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menghadirkan atraksi wisata yang sesuai dengan pangsa pasar yang ada	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024
6	koleksi museum yang stagnan		Menggunakan mekanisme hibah	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mendapatkan koleksi dari masyarakat (tokoh seni)	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024
7	pengembangan desa wisata yang kurang optimal		Melakukan evaluasi desa wisata setiap 5 tahun	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi desa wisata setiap satu tahun sekali	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024

8	kurang terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata		Memperbaiki sarana prasarana destinasi wisata	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Lebih intensif dalam perbaikan dan perawatan sarana prasarana destinasi wisata	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024
9	Tidak semua pelaku ekonomi kreatif bergabung dalam ekosistem ekonomi kreatif		Melakukan sosialisasi pentingnya bergabung dalam ekosistem ekonomi kreatif	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan event-event ekonomi kreatif sub sektor	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024
10	kurang berkembangnya kapasitas ekonomi kreatif		Melakukan penguatan ekosistem pelaku ekonomi kreatif melalui event sub sektror	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan event-event ekonomi kreatif	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024
11	menurunnya minat atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga		Memberikan motivasi dan apresiasi kepada atket yang berbakat	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Lebih memperhatikan pemberian bonus kepada atlet yang berprestasi	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024
12	keterlambatan dalam memenuhi permintaan data dari pihak terkait		Mengusulkan SDM yang memadai	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menambah SDM yang memadai	Kepala DINPORABUDPAR	Tahun 2024

LAMPIRAN FORM 8C

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN (OPERASIONAL OPD)
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan pelibatan kelompok kesenian pada kegiatan workshop dan pementasan kesenian untuk pelestarian kebudayaan	Workshop dan kegiatan kesenian	Dinporabudpar	Kelompok kesenian terkait	Tahun 2024		
2	Mengoptimalkan kegiatan pelatihan wirausaha yang produktif dan diminati usia muda	Pelatihan	Dinporabudpar	Pemuda usia 16-30 tahun	Tahun 2024		
3	Mengevaluasi jalannya pembinaan pada pengurus cabang olahraga di tingkat Kabupaten Banyumas	Monitoring dan evaluasi	Dinporabudpar	Cabang olahraga	Tahun 2024		
4	Melakukan promosi dengan melibatkan influercer atau key opinion leader (KOL)	Video promosi	Dinporabudpar	Masyarakat	Tahun 2024		
5	Menghadirkan atraksi wisata yang sesuai dengan pangsa pasar yang ada	Media sosial (instagram, youtube, website, aplikasi Dolan Banyumas)	Dinporabudpar	Masyarakat	Tahun 2024		
6	Mendapatkan koleksi dari masyarakat (tokoh seni)	Tatap muka/ pertemuan/ rapat	Masyarakat (Tokoh seni)	Dinporabudpar (museum)	Tahun 2024		
7	Melakukan evaluasi desa wisata setiap satu tahun sekali	Rapat Internal/ evaluasi	Dinporabudpar	Pengelola Desa Wisata	Tahun 2024		
8	Lebih intensif dalam perbaikan dan perawatan sarana prasarana destinasi wisata	Rapat Internal	Dinporabudpar	Pengelola obyek wisata	Tahun 2024		
9	Melakukan event-event ekonomi kreatif sub sektor	Event	Dinporabupar	Pelaku ekraf, masyarakat	Tahun 2024		
10	Melakukan event-event ekonomi kreatif	Event	Dinporabudpar	Pelaku Ekonomi kreatif, masyarakat	Tahun 2024		
11	Lebih memperhatikan pemberian bonus kepada atlet yang berprestasi	Kejuaraan	Dinporabudpar	Atlet	Tahun 2024		

12	Menambah SDM yang memadai	Rapat internal	Dinporabudpar	OPD terkait	1 tahun	1 tahun	Alokasi SDM dimaksud di bagian Perencanaan

LAMPIRAN FORM 9C

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan pelibatan kelompok kesenian pada kegiatan workshop dan pementasan kesenian untuk pelestarian kebudayaan					
2	Mengoptimalkan kegiatan pelatihan wirausaha yang produktif dan diminati usia muda					
3	Mengevaluasi jalannya pembinaan pada pengurus cabang olahraga di tingkat Kabupaten Banyumas					
4	Melakukan promosi dengan melibatkan influercer atau key opinion leader (KOL)					
5	Menghadirkan atraksi wisata yang sesuai dengan pangsa pasar yang ada					
6	Mendapatkan koleksi dari masyarakat (tokoh seni)					
7	Melakukan evaluasi desa wisata setiap satu tahun sekali					
8	Lebih intensif dalam perbaikan dan perawatan sarana prasarana destinasi wisata					
9	Melakukan event-event ekonomi kreatif sub sektor					
10	Melakukan event-event ekonomi kreatif					
11	Lebih memperhatikan pemberian bonus kepada atlet yang berprestasi					
12	Menambah SDM yang memadai					

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL OPD
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	keterlambatan dalam memenuhi permintaan data dari pihak terkait	ROO.21.XXX.19.19					Menambah SDM yang memadai	Tahun 2024		
2	koleksi museum yang stagnan	ROO.21.222.19.19					Mendapatkan koleksi dari masyarakat (tokoh seni)	Tahun 2024		
3	kualitas daya tarik wisata kurang menarik minat pengunjung	ROO.21.326.19.19					Menghadirkan atraksi wisata yang sesuai dengan pangsa pasar yang ada	Tahun 2024		
4	kurang berkembangnya kapasitas ekonomi kreatif	ROO.21.326.19.19					Melakukan event-event ekonomi kreatif	Tahun 2024		
5	kurang terpeliharanya sarana dan prasarana destinasi wisata	ROO.21.326.19.19					Lebih intensif dalam perbaikan dan perawatan sarana prasarana destinasi wisata	Tahun 2024		
6	Media promosi dan pemasaran yang dimiliki kurang populer	ROO.21.326.19.19					Melakukan promosi dengan melibatkan influercer atau key opinion leader (KOL)	Tahun 2024		
7	menurunnya minat atlet untuk mengikuti kejuaraan olahraga	ROO.21.219.19.19					Lebih memperhatikan pemberian bonus kepada atlet yang berprestasi	Tahun 2024		
8	minimnya jumlah rintisan wirausaha muda pemula	ROO.21.219.19.19					Mengoptimalkan kegiatan pelatihan wirausaha yang produktif dan diminati usia muda	Tahun 2024		
9	minimnya kelompok kesenian atau sanggar yang aktif di Kabupaten Banyumas	ROO.21.222.19.19					Meningkatkan pelibatan kelompok kesenian pada kegiatan workshop dan pementasan kesenian untuk pelestarian kebudayaan	Tahun 2024		

10	minimnya pelatihan bagi atlet ditingkat pelajar	ROO.21.219.19.19					Mengevaluasi jalannya pembinaan pada pengurus cabang olahraga di tingkat Kabupaten Banyumas	Tahun 2024		
11	pengembangan desa wisata yang kurang optimal	ROO.21.326.19.19					Melakukan evaluasi desa wisata setiap satu tahun sekali	Tahun 2024		
12	Tidak semua pelaku ekonomi kreatif bergabung dalam ekosistem ekonomi kreatif	ROO.21.326.19.19					Melakukan event-event ekonomi kreatif sub sektor	Tahun 2024		

HASIL CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**																																																													**Memadai**
1	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	4	2	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3	2	4	2	4	3	3	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	3	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	2	3	2	2	3	3	3	2	1	3	3	4	3	3	3	4	4	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3	Memadai
6	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai

7	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**																																																														**Memadai**
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	1	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	Memadai

3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	1	3	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**																																																														**Memadai**
1	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	Memadai
2	Kewenangan direviu secara periodik	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
F	**PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**																																																														**Memadai**
1	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	2	3	4	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2	4	3	3	2	3	3	4	3	2	4	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	2	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	Memadai

4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
6	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	4	2	3	3	3	2	2	4	2	3	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	1	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	2	4	1	3	4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
G	**PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF**																																																													**Memadai**
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	Memadai

5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**																																																													**Memadai**
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai